

# Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional



 [jdihnindonesia](#)  [JDIH Nasional](#)  [@jdihnindonesia](#)  [JDIHN Indonesia](#)

 [bphn.jdihn.go.id](#)  [jdihn.go.id](#)

# KEMAJUAN TERKINI PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL



Disampaikan oleh

**Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional**

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

dalam kegiatan

**Pembinaan Admin Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum SKPD dan**

**Desa Se-Kabupaten Banyuwangi**

Banyuwangi, 26 Februari 2020

# DRS. YASMON, M.L.S.

TTL : Saniangbaka, Solok, Sumatera Barat, 20 Mei 1968

Nip : 19680520 199403 1 002

Pangkat (Gol/Ruang) : Pembina Utama Madya (IV/D)

Pendidikan :

- Sarjana Sastra Inggris (Drs.), Fakultas Sastra, Universitas Andalas, 1991;
- *Master Of Legal Studies (MLS), School Of Law, University Of Technology Sydney, Australia, 1999*

Riwayat Jabatan :

- Kepala Biro Perlengkapan, Kemenkumham, 2014-2015
- Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual, Kemenkumham, 2015 –2017
- Kepala Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan, Kemenkumham, 2017 –2018
- **Kepala Pusat Dokumentasi Dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, BPHN, Mei 2018**

Diklat Penjenjangan : Diklatpim I Angkatan XXX Tahun 2015

Hp / Wa : 08118582005 E-mail : Udayasmon@gmail.Com



# BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL



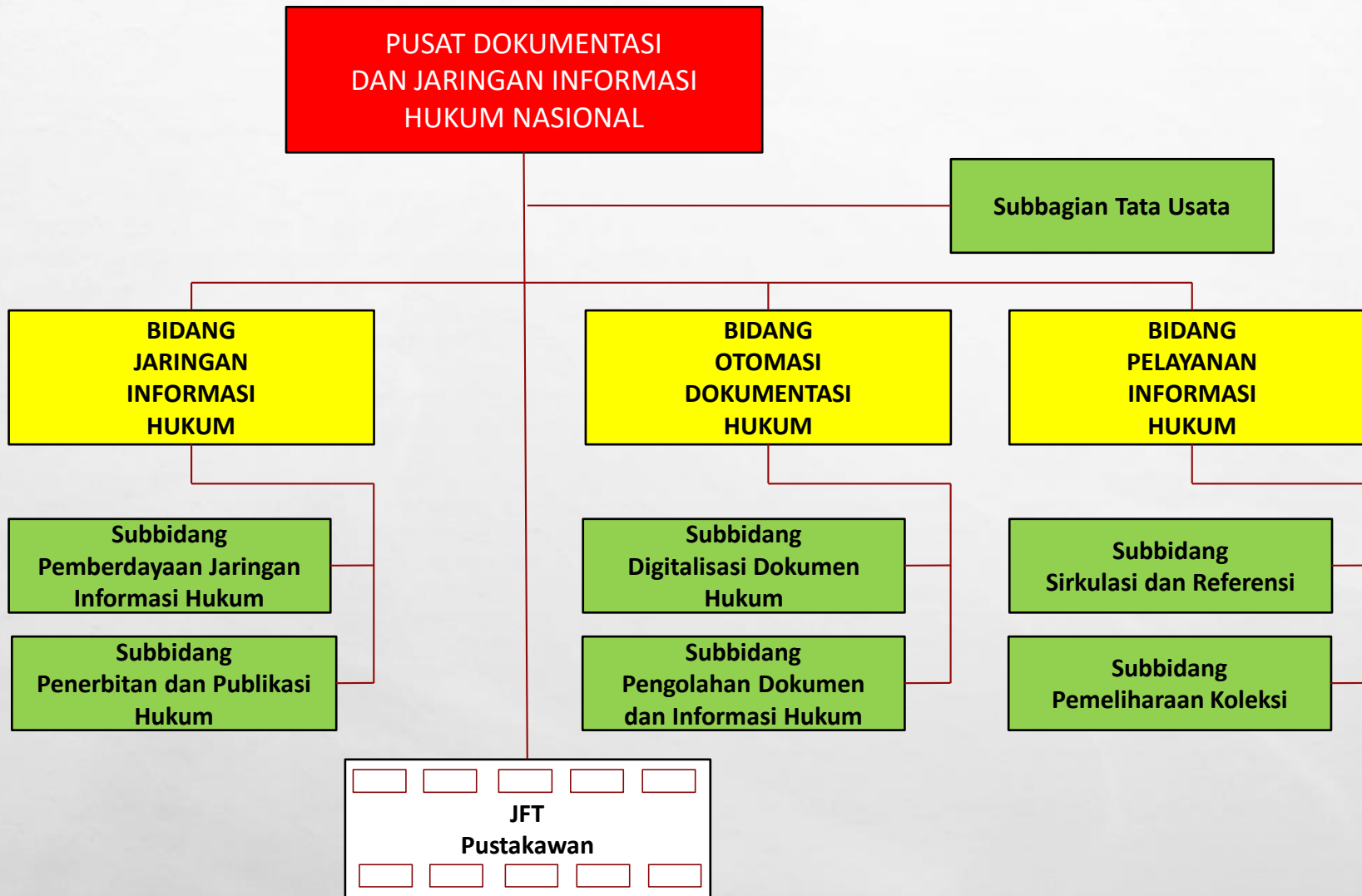
**BPHN**

- **Tugas:**

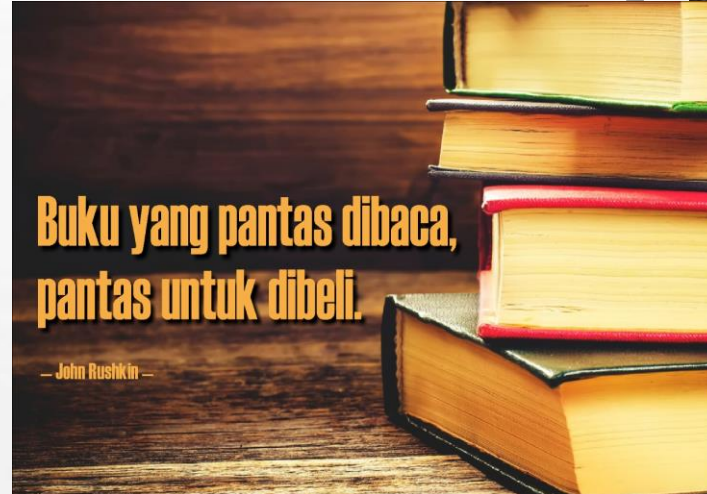
Melaksanakan Pembinaan Hukum Nasional Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

- **Fungsi :**

- a. Penyusunan Kebijakan Teknis, Program, dan Anggaran di Bidang Pembinaan Hukum Nasional;
- b. Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Hukum, Perencanaan Hukum, Penyuluhan dan Bantuan Hukum, serta Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum;
- c. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Hukum, Perencanaan Hukum, Penyuluhan dan Bantuan Hukum, serta Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum;
- d. Pelaksanaan Administrasi Badan Pembinaan Hukum Nasional; dan
- e. Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Menteri.



# Organisasi dan Tata Kerja



# Tugas dan Fungsi

Tugas : Melaksanakan Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional

Fungsi :

- a. Penyusunan Kebijakan dan Standardisasi Teknis, Program dan Anggaran Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum;
- b. Koordinasi dan Kerja Sama Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum;
- c. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- d. Pelaksanaan Pengumpulan, Pengolahan, Penyimpanan Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- e. Penyiapan Naskah Penerbitan dan Publikasi Hukum;
- f. Pelaksanaan Pelayanan, Pelestarian Dokumen Hukum, Penyebarluasan dan Penemuan Kembali Informasi Hukum;
- g. Perencanaan Program dan Anggaran Pusat;
- h. Pengembangan Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pusat Dokumentasi Dan Jaringan Informasi Hukum Nasional; dan
- i. Pelaksanaan Urusan TU dan RT Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional.

Pakai baju lama dan  
beli buku baru.

—Austin Phelps —

Kita membaca untuk mengetahui  
bahwa kita tidak sendirian.

— C. S. Lewis —

*Belajar membaca bagaikan menyalakan api,  
setiap suku kata yang di eja akan menjadi  
percik yang menerangi*

—Victor Hugo —

# Sumber Daya Manusia

Jabatan	Eselon	Jumlah
Kepala Pusat	II a	1
Kepala Bidang	III a	3
Kepala Subbbidang	IV a	6
Kepala Subbagian	IV a	1
JFT Pustakawan Madya		2
JFT Pustakawan Muda		6
JFT Pustakawan Pertama		10
JFT Pustakawan Terampil		1
JFT Pustakawan Pelaksana		2
Honorer		1
<b>JFU</b>		<b>10</b>
<b>TOTAL</b>		<b>43</b>

**PENATAAN REGULASI  
SEBAGAI SALAH SATU PRIORITAS  
PEMERINTAH**



# 5 PRIORITAS KERJA JOKOWI-MA'RUF

Pelantikan Presiden & Wakil Presiden RI  
Periode 2019-2024

“**Pertama**, pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama kita. **Kedua**, pembangunan infrastruktur akan kita lanjutkan. **Ketiga**, segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas. **Keempat**, penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-besaran. **Kelima** adalah transformasi ekonomi.”

*Presiden Joko Widodo*  
Minggu, 20 Oktober 2019

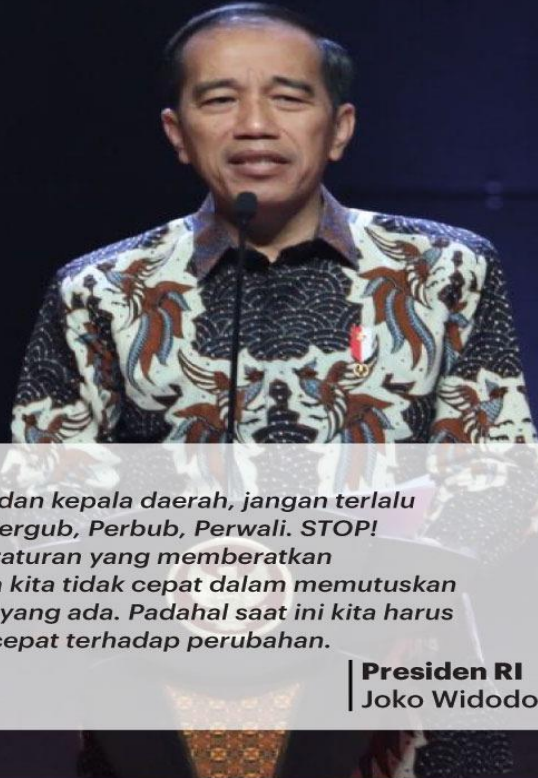


#BersamaIndonesiaMaju

# Rakornas Indonesia Maju 2019



**RAKORNAS**  
Indonesia Maju  
Pemerintah Pusat dan Forkopimda  
Tahun 2019



“ Saya pesan ke DPRD dan kepala daerah, jangan terlalu banyak buat Perda, Pergub, Perbub, Perwali. STOP! Jangan membuat peraturan yang memberatkan masyarakat. Akhirnya kita tidak cepat dalam memutuskan terhadap perubahan yang ada. Padahal saat ini kita harus fleksibel, merespon cepat terhadap perubahan.

Presiden RI  
Joko Widodo

“Sinergi untuk Indonesia Maju”



@kemendagri\_ri @kemendagri @kemendagri www.kemendagri.go.id



Kementerian Dalam Negeri  
Republik Indonesia



**RAKORNAS**  
**INDONESIA MAJU**  
Pemerintah Pusat dan Forkopimda  
Tahun 2019

## LATAR BELAKANG MASALAH DALAM PENATAAN REGULASI

Prof. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D.  
MENTERI HUKUM & HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

1 Terlalu banyaknya Regulasi di Indonesia  
Mulai Dari Tingkat Pusat Sampai Dengan  
Daerah

2 Tumpang Tindih Peraturan Perundang-undangan  
Baik Secara Vertikal dan Horizontal

3 Menghambat Iklim Investasi dan  
Kemudahan Berusaha Di Indonesia

## ARAHAN PRESIDEN

Pembangunan  
SDM

Pembangunan  
Infrastruktur

Simplifikasi  
Regulasi

Penyederhanaan  
Birokrasi

Transformasi  
Ekonomi

Rabu, 13 November 2019

#sinergiindonesiamaju

www.kemendagri.go.id

Kemendagri\_RI

@kemendagri

@kemendagri

# ARAHAN PRESIDEN



*Sumber: Kompas.com - 24/10/2019, 11.33 WIB*

## Jokowi Minta Menteri Kumpulkan Regulasi yang Tumpang Tindih dalam Waktu 1 Bulan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta para menteri dan pembantunya di Kabinet Indonesia Maju untuk mengumpulkan regulasi yang tumpang tindih dan berpotensi menghambat investasi.

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10/2019). Ini adalah rapat pertama di era Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Negara ini terlalu banyak regulasi dan peraturan," kata Jokowi.

# ARAHAN PRESIDEN

Jokowi ingin agar ke depan aturan yang berbelit-belit bisa dipangkas.

Ini berlaku baik aturan setingkat undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri, hingga peraturan daerah.

"Termasuk di daerah nanti Mendagri tolong digarisbawahi peraturan gubernur, bupati, wali kota yang masih banyak sekali tumpang tindih dengan peraturan di atasnya," kata dia.

Jokowi ingin agar setiap kementerian dan lembaga bisa cepat bekerja mengumpulkan aturan yang tumpang tindih ini. Ia bahkan memberi target satu bulan.

"Yang menghambat pelayanan terhadap masyarakat, yang menghambat investasi dunia usaha, segera kumpulkan dalam waktu sebulan ini. Nanti akan segera rapat dua minggu lagi agar kita bisa bekerja dengan cepat," kata dia.

*Sumber: Kompas.com - 24/10/2019, 11.33 WIB*

# REFORMASI HUKUM JILID II

Home / News / Nasional

## Ini Fokus Jokowi dalam Reformasi Hukum Jilid II

FABIAN JANUARIUS KUWADO

Kompas.com · 17/01/2017, 17:10 WIB



### 1. Penataan Regulasi

2. Perluasan Jangkauan Bantuan Hukum kepada Masyarakat Kecil

3. Membangun rasa aman di lingkungan masyarakat melalui pengembangan pemolisian masyarakat (polmas)

# Agenda Penataan Regulasi



# **PENGELOLAAN DOKUMENTASI & TEKNOLOGI INFORMASI**



# Pengelolaan Dokumentasi ...



*The Traditional Way*

# Pengelolaan Dokumentasi



Paper Document



Scanner



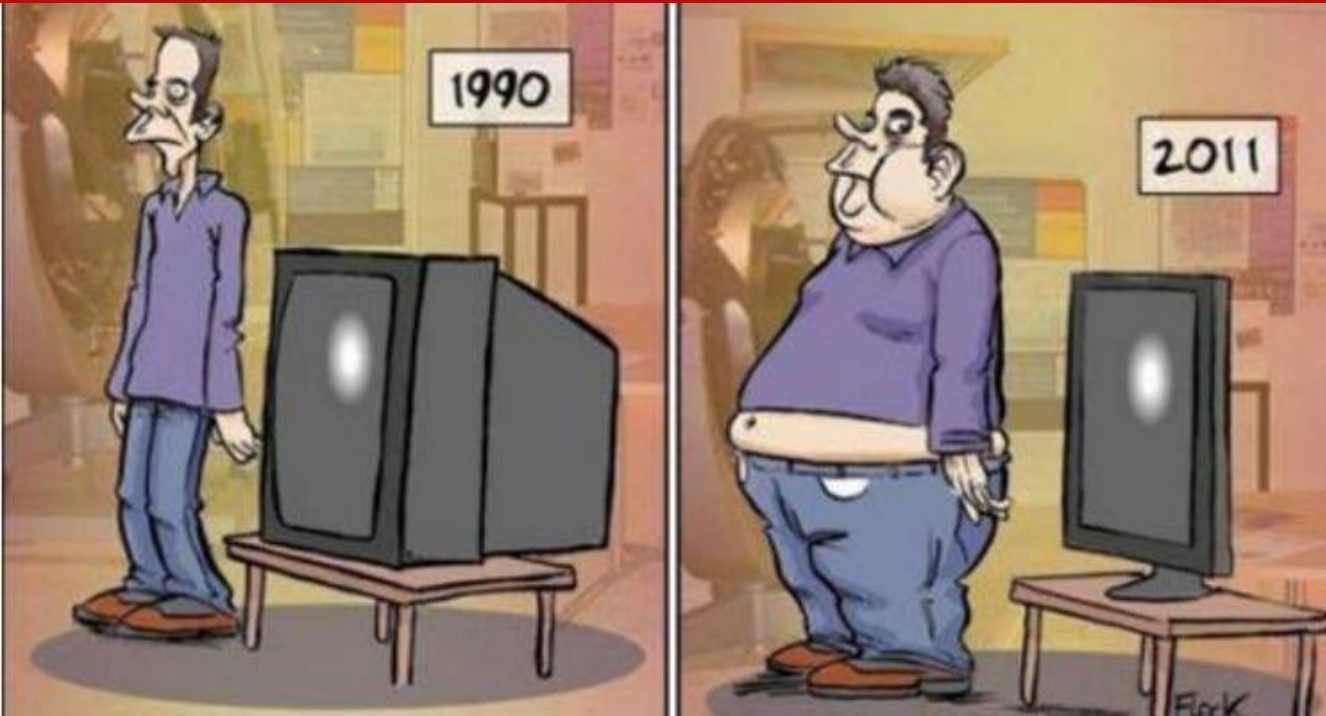
Transfer paper document into digital



Share paper document from one system to another .

*Modern May*

# Zaman Old vs Zaman Now



## Keluarga Zaman NOW



JAN  
2020

# DIGITAL AROUND THE WORLD IN 2020

THE ESSENTIAL HEADLINE DATA YOU NEED TO UNDERSTAND MOBILE, INTERNET, AND SOCIAL MEDIA USE

TOTAL  
POPULATION



**7.75**  
**BILLION**

URBANISATION:

**55%**

UNIQUE MOBILE  
PHONE USERS



**5.19**  
**BILLION**

PENETRATION:

**67%**

INTERNET  
USERS



**4.54**  
**BILLION**

PENETRATION:

**59%**

ACTIVE SOCIAL  
MEDIA USERS



**3.80**  
**BILLION**

PENETRATION:

**49%**



we  
are  
social



JAN  
2019

# INDONESIA

THE ESSENTIAL HEADLINE DATA YOU NEED TO UNDERSTAND MOBILE, INTERNET, AND SOCIAL MEDIA USE



TOTAL  
POPULATION



**268.2**  
MILLION

URBANISATION:

**56%**

MOBILE  
SUBSCRIPTIONS



**355.5**  
MILLION

vs. POPULATION:

**133%**

INTERNET  
USERS



**150.0**  
MILLION

PENETRATION:

**56%**

ACTIVE SOCIAL  
MEDIA USERS



**150.0**  
MILLION

PENETRATION:

**56%**

MOBILE SOCIAL  
MEDIA USERS



**130.0**  
MILLION

PENETRATION:

**48%**



we  
are  
social



we  
are  
social

# Industrial Revolution 4.0

... tren di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi siber...



# *Mencari dokumen hukum ?*

Google



HUKUM  
ONLINE  
.COM

**peraturan.go.id**

eCLIS.id



WIKIPEDIA



undang undang pemilu



Semua

Berita

Gambar

Video

Maps

Lainnya

Setelan

Alat

Sekitar 22.500.000 hasil (0,49 detik)

### [Inilah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum](https://setkab.go.id/inilah-undang-undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilihan-u...)

<https://setkab.go.id/inilah-undang-undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilihan-u...>

22 Agu 2017 - Menurut UU ini, peserta **Pemilu** untuk **pemilihan umum** anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota. adalah partai politik, yang ...

### [\[PDF\] Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum](indonesia-oslo.no/.../UU_Nomor_7_Tahun_2017_-_Batang_Tubuh_-_Hal._1-150.pdf)

[indonesia-oslo.no/.../UU\\_Nomor\\_7\\_Tahun\\_2017\\_-\\_Batang\\_Tubuh\\_-\\_Hal.\\_1-150.pdf](indonesia-oslo.no/.../UU_Nomor_7_Tahun_2017_-_Batang_Tubuh_-_Hal._1-150.pdf)

**Pemilihan Umum** Presiden dan Wakil presiden,. Undangl Indang. Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaL lepilihan. Umum, dan **Undang-Undang** Nomor ...

### [\[PDF\] Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum](www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/138/3541.bpkp)

<www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/138/3541.bpkp>

d. bahwa **Undang-Undang** Nomor 42 Tahun 2008 tentang. **Pemilihan Umum** Presiden dan Wakil Presiden, Undang-. Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang ...

### [KPU Setuju Undang-Undang Pemilu Direvisi - Nasional Kompas](https://nasional.kompas.com)

<https://nasional.kompas.com> > News > Nasional

25 Apr 2019 - KPU sependapat untuk memformulasikan aturan baru, guna diterapkan di **pemilu** selanjutnya.



**JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM NASIONAL**



# DASAR HUKUM

KEPUTUSAN  
JARINGAN DO



ARINGAN

# LATAR BELAKANG

Dokumentasi Dan Informasi Hukum Yang Tertata Dan Terselenggara Dengan Baik Dalam Suatu Jaringan Nasional Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dalam Penyelenggaraan Ketata Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Dan Bertanggung Jawab Untuk Memenuhi Tuntutan Masyarakat Atas Dokumen Dan Informasi Hukum Yang Dibutuhkan;

Untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu dan terintegrasi;

# PENGERTIAN

**Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional** yang selanjutnya disebut **JDIHN** adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat;

**DOKUMEN HUKUM** adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada **putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan;**

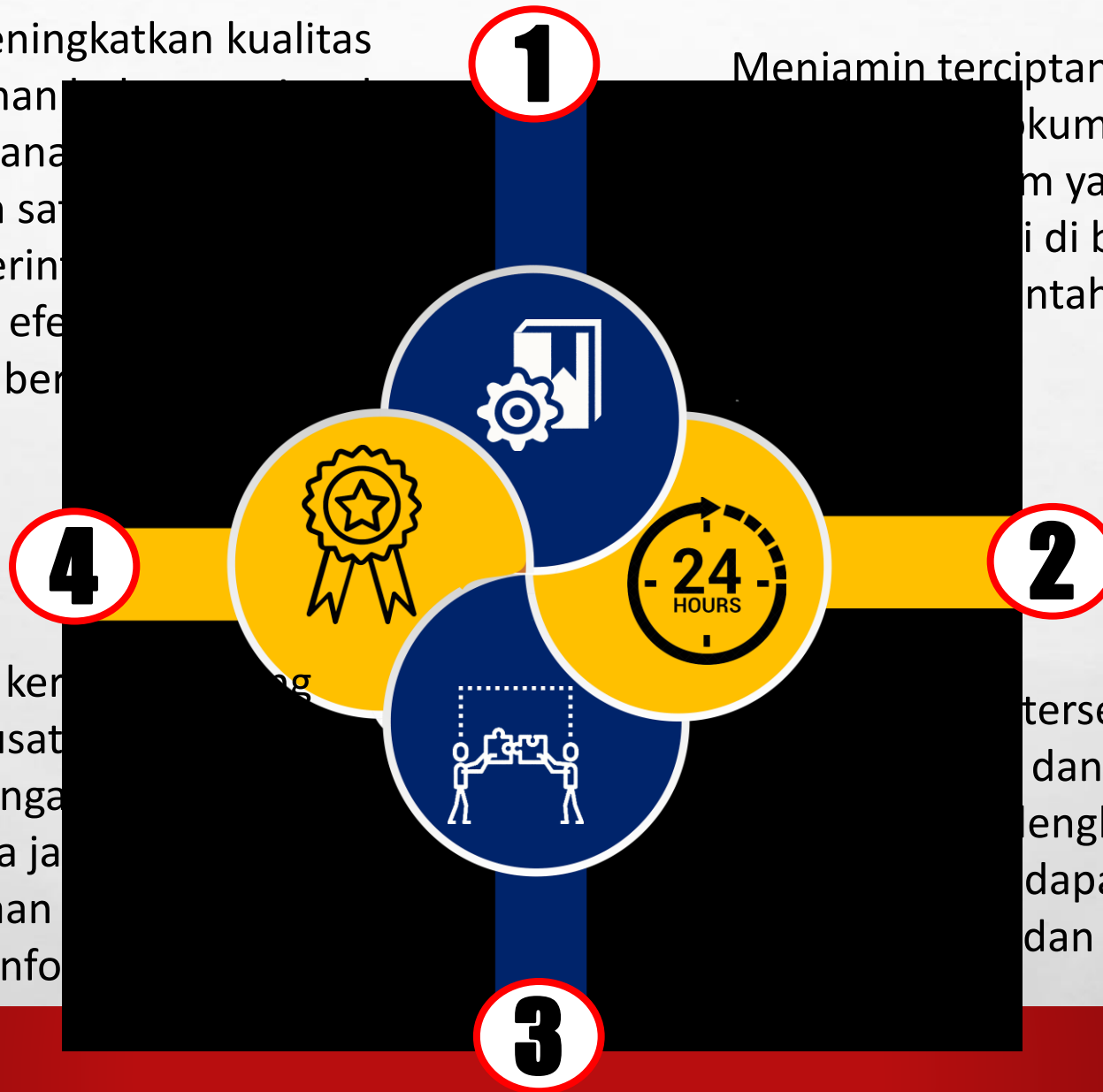
# TUJUAN

Meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan sebagai salah satu prioritas pemerintah yang transparan, efektif, dan berorientasi pada

Menjamin terciptanya dokumentasi dan sistem yang terpadu yang di berbagai tingkat pemerintah dan institusi

Mengembangkan kerja sama yang efektif antar Pusat dan Anggota jaringan sebagai sesama Anggota jaringan dalam rangka penyediaan layanan dan informasi

tersedia dan informasi yang lengkap dan dapat diakses dengan mudah



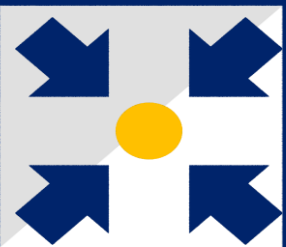
# ORGANISASI

- ✓ Organisasi JDIHN terdiri dari :
  - ❖ **Pusat JDIHN**; dan
  - ❖ **Anggota JDIHN**
- ✓ **Badan Pembinaan Hukum Nasional**, Kementerian Hukum dan HAM merupakan **Pusat JDIHN**
- ✓ Anggota JDIHN:
  - ❖ Biro hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Dokumen Hukum pada:
    - Kementerian Negara;
    - Sekretariat Lembaga Negara;
    - Lembaga Pemerintahan Non Kementerian;
    - Pemerintah Provinsi;
    - Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
    - Sekretariat DPRD Tingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota
  - ❖ Perpustakaan hukum pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta;
  - ❖ Lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan oleh Menteri

# ORGANISASI



Pimpinan Instansi (**Kementerian Negara, Sekretariat Lembaga Negara, LPNK, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota, Sekretariat DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota**) wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya



**Kementerian Negara dan Sekretariat Lembaga Negara** bertindak sebagai Pusat JDIH di lingkungannya



**Pemerintah Provinsi** bertindak sebagai **Pusat JDIH** di wilayahnya

# ORGANISASI

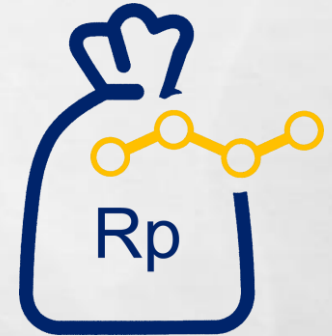
Pusat JDIHN dan Anggota JDIHN wajib melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan menyediakan



Sarana  
dan  
Prasarana



Sumber  
Daya  
Manusia

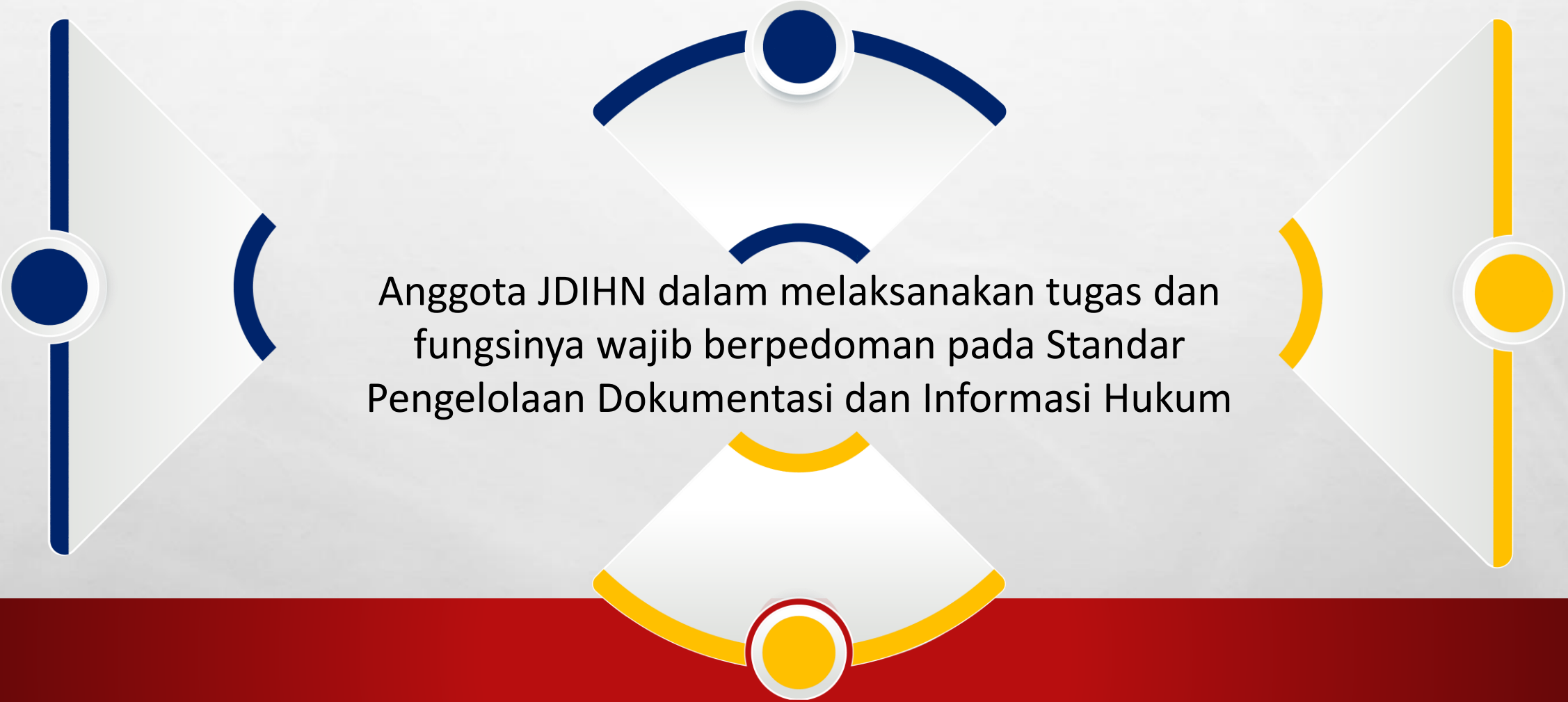


Anggaran

# Tugas dan Fungsi Anggota JDIHN

- 1) Anggota JDIHN bertugas untuk melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh instansinya.
- 2) Anggota jdihn menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan instansinya;
  - b. Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIHN;**
  - c. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH di lingkungannya;
  - d. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH di lingkungannya;
  - e. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH di lingkungannya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun; dan
  - f. Penyampaian laporan** setiap tahun di bulan desember kepada pusat JDIHN.

# STANDAR PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM



Anggota JDIHN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib berpedoman pada Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum

**KEMAJUAN TERKINI**

**JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM NASIONAL**



# PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM (10 JUNI 2019)

1

Standar Pembuatan Abstrak Peraturan Perundang-undangan

2

Standar Pengolahan Dokumen dan Informasi Hukum



3

Standar Laporan Evaluasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

# PETA ANGGOTA JDIHN

(KONDISI : 21 FEBRUARI 2020)

INSTITUSI	Jumlah	Website Utama	Website JDIH	Integrasi dgn jdihn.go.id
Kementerian (di luar Kemenkumham)	33	33	31	30
Lembaga Negara	10	10	8	6
Lembaga Non Struktural	96	61	10	3
LPNK	34	34	26	19
Pemerintah Provinsi	34	34	32	27
Pemerintah Kabupaten	416	415	317	169
Pemerintah Kota	98	98	90	50
DPRD Provinsi	34	24	3	2
DPRD Kabupaten	415	149	11	2
DPRD Kota	93	48	1	0
Perpustakaan Hukum	399	248	5	2
Lembaga Lainnya	0	0	0	0
Unit Eselon I Kemenkumham	11	11	5	4
Kanwil Kemenkumham	33	33	33	33
<b>Total</b>	<b><u>1.706</u></b>	<b><u>1.198</u></b>	<b><u>572</u></b>	<b><u>347</u></b>
<b>Persentase</b>	<b><u>100%</u></b>	<b><u>70%</u></b>	<b><u>34%</u></b>	<b><u>20%</u></b>

# bphn.jdihn.go.id

Website JDIH pada Badan  
Pembinaan Hukum Nasional  
(BPHN) sebagai Satuan Kerja

Menggunakan Aplikasi Standar  
Pengolahan Dokumen dan Informasi  
Hukum (*Indonesian Legal Documentation  
and Information System – ILDIS*), versi  
2019



# jdihn.go.id

- ❖ *Portal & Search Engine* JDIHN
- ❖ Menggunakan aplikasi integrasi JDIHN versi 2019.
- ❖ Sebelumnya menggunakan alamat domain [www.Jdihn.Id](http://www.Jdihn.Id) dengan aplikasi integrasi JDIHN versi 2017
- ❖ Aplikasi integrasi JDIHN versi 2019 -- > khazanah dokumen hukum indonesia

# PORTAL JDIHN [jdihn.go.id](http://jdihn.go.id)



JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

[Tentang JDIHN](#) [Anggota JDIHN](#) [Agenda](#) [Berita](#) [Galeri Foto / Video](#) [Ruang Unduh](#) [FAQ](#) [Login](#) [Registrasi](#) [Integrasi](#)



PENELITIAN  
HUKUM

RANCANGAN  
PERATURAN  
PERUNDANG-  
UNDANGAN

## Khazanah Dokumen Hukum Indonesia

Temukan dokumen hukum yang Anda cari disini.

Klik di Sini

YURISPRUDENSI

ARTIKEL  
HUKUM

NASKAH  
AKADEMIK

Pencarian

Tipe Dokumen

Jenis Dokumen

Berdasarkan No Dokumen

Masukkan Tahun

Instansi

Status

39.161



Produk Hukum Tingkat Pusat

155.146



Produk Hukum Tingkat Daerah

24.062



Produk Hukum Era Kolonial

15.402



Monografi Hukum

26.289



Artikel / Majalah Hukum

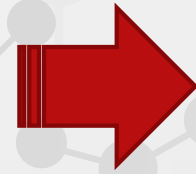
3.075



Yurisprudensi / Putusan

# Aplikasi Standar Pengolahan Dokumen Hukum

**ILDIS v 1.0**



**ILDIS v 2.0**

## Aplikasi

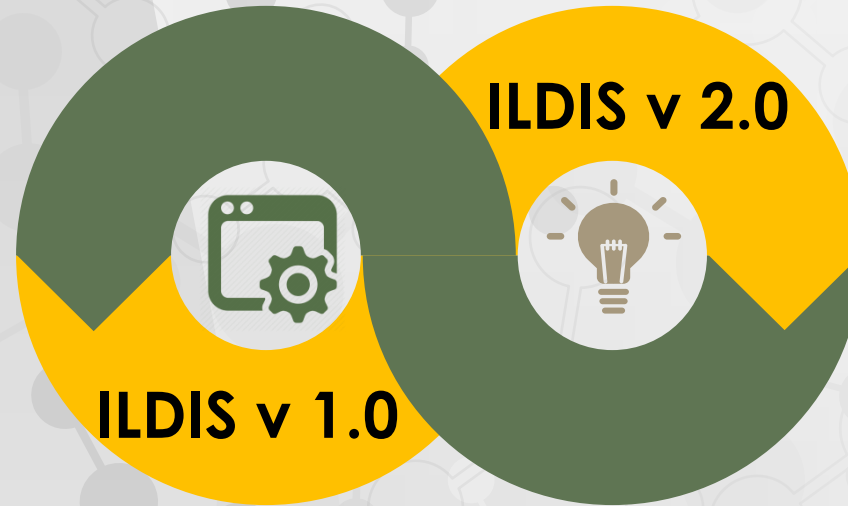
Aplikasi website (*front-end*) dan aplikasi pengolahan dokumen Hukum ada pada 2 aplikasi berbeda.

## Metadata

Metadata sesuai dengan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019.

## Versi PHP

Versi php 5.6



## Aplikasi

Aplikasi website (*front-end*) dan aplikasi pengolahan dokumen Hukum sudah dalam satu aplikasi.

## Metadata

Metadata sesuai dengan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019 + metadata tambahan.

## Versi PHP

Versi php 7.2



# Pelaporan Pengelolaan JDIH Secara Online

<http://e-report.jdihn.go.id/>

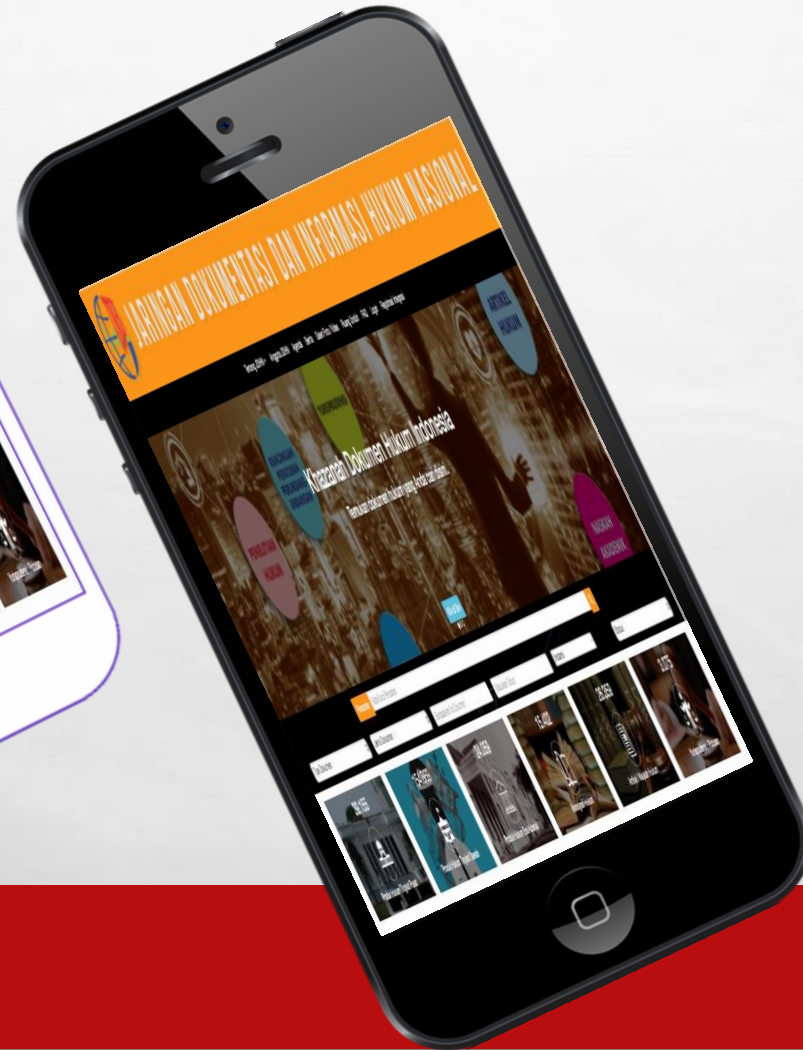


Setiap Anggota JDIHN harus menyampaikan laporan pelaksanaan / pengelolaan JDIH kepada Pusat JDIHN

Mekanisme pelaporan secara manual (mengirimkan berkas hardcopy ke Pusat JDIHN) telah diperbarui dengan pelaporan secara elektronik melalui aplikasi e-Reporting

Laporan disampaikan pada setiap Bulan Desember


# JDIHN On Android



# Penguatan JDIHN melalui SPBE



Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik



Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik



Indikator 15 : Kebijakan Internal Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum



Indikator 33 : Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum

# Satu Data Indonesia



Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia



BPHN sebagai Pusat JDIHN akan menjajagi kemungkinan untuk menjadi Walidata untuk Dokumen Hukum



Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data

# Promosi / Kampanye JDIHN melalui Media Sosial



[www.jdihn.go.id](http://www.jdihn.go.id)



@jdihnindonesia



JDIH Nasional



@jdihnindonesia



jdihn indonesia

# Inovasi Anggota JDIHN

- ✓ Aplikasi JDIH berbasis android & IOS
- ✓ Promosi JDIH melalui berbagai akun media sosial
- ✓ Kios JDIH, pojok JDIH
- ✓ Promosi JDIH melalui berbagai media (videotron, lampu lalu lintas, dll)
- ✓ Website JDIH dalam versi bahasa inggris
- ✓ Penggunaan *digital signature* pada dokumen hukum
- ✓ Majalah JDIH



# Ragam Inovasi Anggota JDIHN

## KABUPATEN GARUT



## DPRD Kab Bungo



## DPRD Kab Bungo



## Kota Sukabumi



## Kota Sukabumi



## DPRD Kab Bungo



# KIOSK JDIH ...



# Ragam Inovasi Anggota JDIHN

## Kab TUBAN



## JDIH Kota Bandung



# Arah Kebijakan 2020

**1**

Percepatan  
Partisipasi  
Anggota JDIHN

Penyempurnaan  
Aplikasi Berbasis  
Android & OS

**3**

**4**

Pengembangan /  
penyempurnaan Sistem  
JDIHN

**5**

Penguatan SDM

**6**

Kelengkapan Koleksi  
Dokumen Hukum untuk  
Mewujudkan Basis Data  
Nasional Dokumen Hukum

**2**

Sosialisasi Aplikasi ILDIS dan  
Aplikasi Integrasi JDIHN

# Arah Kebijakan 2020

**8** *Acknowledgement & Reward*



**7**  
Kampanye / Promosi JDIHN

**9**  
Penyelarasan JDIHN dengan SPBE (Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

Jalinan Kerja Sama dengan Badan Saiber dan Sandi Negara (BSSN) terkait Penggunaan Tanda Tangan Digital (Digital Signature) atau Sertifikasi Elektronik pada Dokumen Hukum

**10**  
**11**

Penyelarasan JDIH dengan kebijakan Satu Data Indonesia (Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia)

**PENGHARGAAN JDIHN**

**“JDIHN AWARDS”**



# JDIHN Awards

## INOVASI

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

Sarana prasarana

Teknis pengelolaan

Koleksi Dokumen Hukum

Sumber Daya Manusia

Organisasi



# #LAPORAN

# #INTEGRASI

# JDIHN Awards 2019

- ✓ **JDIHN Award 2019 Untuk Anggota JDIHN Terbaik Tingkat Kementerian**
  - Terbaik I : Kementerian Keuangan
  - Terbaik II : Kementerian Ketenagakerjaan
  - Terbaik III : Kementerian Badan Usaha Milik Negara
  - Terbaik Harapan I : Kementerian Komunikasi Dan Informatika
  - Terbaik Harapan II: Kementerian Pariwisata
- ✓ **JDIHN Award 2019 Untuk Anggota JDIHN Terbaik Tingkat Lembaga Negara**
  - Terbaik I : Badan Pemeriksa Keuangan
  - Terbaik II : Dewan Perwakilan Daerah
- ✓ **JDIHN Award 2019 Untuk Anggota JDIHN Terbaik Tingkat Lembaga Pemerintah Non Kementerian**
  - Terbaik I : Badan Informasi Geospasial
  - Terbaik II : Badan Nasional Penempatan & Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
  - Terbaik III : Badan Tenaga Nuklir Nasional
- ✓ **JDIHN Award 2019 Untuk Anggota JDIHN Terbaik Tingkat Lembaga Non Struktural**
  - Komisi Pemilihan Umum

# JDIHN Awards 2019

- ✓ **JDIHN Award 2019 Untuk Anggota JDIHN Terbaik Tingkat Pemerintah Provinsi Besar Dengan Jumlah Anggota > 30 Anggota**
  - Terbaik I : Provinsi Jawa Tengah
  - Terbaik II : Provinsi Jawa Barat
  - Terbaik III : Provinsi Jawa Timur
- ✓ **JDIHN Award 2019 Untuk Anggota JDIHN Terbaik Tingkat Pemerintah Provinsi Kecil Dengan Jumlah Anggota < 30 Anggota**
  - Terbaik I : Provinsi Bali
  - Terbaik II : Provinsi Kalimantan Selatan
  - Terbaik III : Provinsi Riau

# JDIHN Awards 2019

## ✓ JDIHN Award 2019 Untuk Anggota JDIHN Terbaik Tingkat Kabupaten

- Terbaik I : Kabupaten Tuban
- Terbaik II : Kabupaten Semarang
- Terbaik III : Kabupaten Garut
- Terbaik Harapan I: Kabupaten Banyuwangi
- Terbaik Harapan II: Kabupaten Bandung
- Terbaik Harapan III: Kabupaten Pematang

## ✓ JDIHN Award 2019 Untuk Anggota JDIHN Terbaik Tingkat Kota

- Terbaik I : Kota Sukabumi
- Terbaik II : Kota Surakarta
- Terbaik III : Kota Bandung
- Terbaik Harapan I : Kota Ambon
- Terbaik Harapan II : Kota Batam

# JDIHN Awards 2019

✓ **JDIHN Award 2019 Untuk Anggota JDIHN Terbaik Tingkat Sekretariat DPRD**

**Sekretariat DPRD Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi**

✓ **Jdihn Award 2019 Untuk Anggota Jdihn Terbaik Tingkat Perpustakaan Hukum**

- **Universitas Pamulang**

# JDIHN Awards 2019

- ✓ **JDIHN Award 2019 Untuk Anggota JDIHN Dengan Metadata Terlengkap**
  - **Provinsi Aceh**
- ✓ **JDIHN Award 2019 Untuk Anggota JDIHN Dengan Aplikasi Android Terbaik**
  - **Kementerian Keuangan**
- ✓ **JDIHN Award 2019 Untuk Anggota JDIHN Dengan Laman Internet JDIH Dwibahasa**
  - **Kementerian Badan Usaha Milik Negara**
- ✓ **JDIHN Award 2019 Untuk Anggota JDIHN Dengan Inovasi Sosialisasi / Kampanye Teraktif**
  - **Kabupaten Tuban**

# JDIHN AWARDS 2019

- ✓ **JDIHN AWARD 2019 UNTUK ANGGOTA JDIHN TINGKAT UNIT ESELON I KEMENKUMHAM**
  - TERBAIK I : DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA
  - TERBAIK II : DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
  - TERBAIK III : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM
- ✓ **JDIHN AWARD 2019 UNTUK ANGGOTA JDIHN TINGKAT KANWIL KEMENKUMHAM BESAR DENGAN JUMLAH ANGGOTA > 30**
  - TERBAIK I : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR
  - TERBAIK II : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN
  - TERBAIK III : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH
- ✓ **JDIHN AWARD 2019 UNTUK ANGGOTA JDIHN TINGKAT KANWIL KEMENKUMHAM KECIL DENGAN JUMLAH ANGGOTA < 30**
  - TERBAIK I : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH
  - TERBAIK II : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
  - TERBAIK III : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU





# JDIHN Expo 2019

- ✓ **Terbuka, Volunter**
- ✓ **Promosi / Kampanye JDIH**
- ✓ **Pameran Pengelolaan JDIH oleh Anggota JDIHN**
- ✓ **Ajang tukar informasi dan pengalaman dalam mengelola JDIH**
- ✓ **Lomba Stand Terbaik**

# Kondisi Terkini Pengelolaan JDIH di Lingkungan Provinsi Jawa Timur

<b>Instansi</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Website JDIH</b>	<b>Integrasi dgn jdihn.go.id</b>
<b>Biro Hukum Pemerintah Provinsi</b>	1	1	1
<b>Bagian Hukum Kabupaten</b>	29	29	8
<b>Bagian Hukum Kota</b>	9	9	2
<b>Bagian Hukum DPRD Prov</b>	1	-	-
<b>Bagian Hukum DPRD Kab</b>	29	-	-
<b>Bagian Hukum DPRD Kota</b>	9	-	-
<b>Perpustakaan Hukum</b>	64	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>142</b>	<b>39</b>	<b>11</b>

# Kunjungi & Hubungi Kami

	Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
	Jalan Mayjen Sutoyo No. 10 Cililitan – Jakarta Timur
	<a href="mailto:jdihn@bphn.go.id">jdihn@bphn.go.id</a>
	Reinal Saputra, S.H., M.H. (082111153549) Diden Priya Utama, S.Kom (08128245515)

# Khazanah Dokumen Hukum Indonesia



[jdihn.go.id](http://jdihn.go.id)